

SISTEM PEMBIAYAAN SMU PLUS

Konsultan

Dr. Ghulam Farid Malik

Ketua

Dr Hafid Abbas

Anggota

Dr Ibrahim Musa

Dr Awaluddin Tjalla

Dr Danny Meirawan, MS.Pd

Drs Ahmad Tijari, MPd

Drs RA Hirmana Wargahadibrata, Msc. (Ed)

Dra Endang M Kurnianti, M.Ed

Ishak Gerard Bachtiar, S.Si

**DIBIYAI OLEH PROYEK
DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

IKIP JAKARTA

Kampus Rawamangun Jakarta Timur
Kantor Pembantu Rektor I Tlp: 47860238, Fax: 4895130
E-mail: hafidabbas@yahoo.com

JUNI 1999

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	
B. Masalah Penelitian	
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
Bab II Kajian Konseptual	
A. Pengertian	
B.	
Bab III Metodologi Penelitian	
A. Tempat Penelitian	
B. Populasi dan Sampel	
C. Teknik Analisis Data	
Bab IV Temuan – Temuan	
Bab V Rekomendasi	
Lampiran	

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada pertemuan para Menteri Pendidikan dari sembilan negara berkembang berpenduduk terbesar yaitu China, India, Indonesia, Brazil, Mexico, Mesir, Pakistan, Srilangka, dan Bangladesh, yang diselenggarakan di Bali (1994), disepakati bahwa pembiayaan pendidikan disarankan minimal 6,00 % dari total GNP.¹ Bagi Indonesia, kesepakatan itu sulit dipenuhi mengingat adanya berbagai kesulitan finansial yang dihadapi. Pada tahun 1995 pada saat perekonomian Indonesia masih kukuh, anggaran pendidikan berkisar 2,80 % dari total GNP. Anggaran ini meskipun dinilai cukup tinggi, namun amat rendah dibanding dengan banyak negara berkembang lainnya. India dan Thailand mengalokasikan 3,80 % GNP, dan Malaysia 5,30 %.² Saat ini diperkirakan anggaran pendidikan telah turun pada tingkat yang lebih rendah lagi.

Rendahnya anggaran pembiayaan pendidikan apabila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, tampaknya belum dapat diatasi. Apalagi sejak sekitar dua tahun terakhir ini, Indonesia amat terpuruk dari krisis moneter yang selanjutnya telah berimplikasi pada krisis-krisis lainnya termasuk politik dan sosial. Ketegangan-ketegangan sosial dan berbagai bentuk kerusakan telah melanda banyak tempat di wilayah tanah air tercinta ini. Secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Kenyataan-kenyataan ini memberi kesan bahwa prioritas untuk meningkatkan anggaran pendidikan belum dapat dilakukan.

1

Lihat Laporan Education for All Meeting di Bali, (UNESCO Report 1994).

2

ADB and The University of Hongkong, Financing of Education in Indonesia. Manila: ADB, 1998, p. 49

Bertok dari kenyataan-kenyataan itu, pengembangan SMU Plus yang telah dirintis sejak periode Wardiman Djojonegoro (Mantan Menteri Pendidikan dan kebudayaan), perlu dikaji secara lebih komprehensif agar dapat meningkatkan pemberdayaan sekolah dan masyarakat untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan terutama pengoperasian sekolah yang berorientasi pada kualitas unggul. Peran serta masyarakat untuk membiayai pendidikan perlu ditingkatkan. Peran masyarakat ini telah diatur dalam Undang-undang tentang sistem Pendidikan Nasional. Untuk sekolah pemerintah atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, biaya penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab pemerintah (UU Sistem Pendidikan Nasional 1989, pasal 36;1). Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan/perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan. Pemerintah dapat memberi bantuan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selama ini, bagi SMU Plus negeri, sumber dana sekolah terutama bersumber dari anggaran pemerintah, melalui dana rutin yang dialokasikan untuk kepentingan gaji guru dan pegawai. Selain itu, sumber dana lainnya adalah dana BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan). Meskipun pemerintah memberikan sumbangan yang besar terhadap biaya pendidikan di sekolah negeri, namun kontribusi BP3 dalam pembiayaan pendidikan ternyata cukup besar, yakni berkisar 20,00 % - 40,00 %. Lain halnya bagi sekolah swasta, dukungan pemerintah amat kecil. Dilaporkan oleh ADB bahwa kontribusi pemerintah terhadap sekolah swasta amat kecil.³ Demikian pula sebaliknya kontribusi masyarakat terhadap sekolah negeri hanya berkisar 8,00 % dari total anggaran pembiayaan sekolah negeri itu. Akibatnya jika suatu sekolah negeri rusak, masyarakat tidak terdorong untuk

3

ADB and The University of Hongkong, Financing of Education in Indonesia. Manila: ADB, 1998.

memperbaikinya karena mereka menilai bahwa lembaga pendidikan itu bukan miliknya, melainkan milik pemerintah.

B. Permasalahan

Pola pengembangan SMU Plus yang terjadi selama ini ditandai dengan tiga ciri. Pertama, pengembangan SMU Plus dilakukan sepenuhnya atas inisiatif pemerintah melalui pengembangan SMU Plus negeri. Kedua, pengembangan SMU Plus dilakukan sepenuhnya oleh pihak swasta terutama dari aspek pendanaan, tanpa membebani pemerintah. Ketiga, pengembangan SMU Plus dilakukan melalui jaringan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat melalui pembentukan suatu wadah berupa Yayasan. Bertolak dari ketiga pola pengembangan ini, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana bentuk pola pembiayaan SMU Plus yang dapat memberdayakan sekolah agar lebih mandiri.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) manajemen pembiayaan SMU Plus baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama, dan (2) identifikasi pola penerimaan dana bagi sekolah. Selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai: (1) masukan bagi pihak Kantor Wilayah dan Direktorat Pendidikan Dasar dan menengah dalam membenahi berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan sekolah, (2) masukan dalam pengembangan perencanaan strategis sekolah, dan (3) masukan dalam memacu potensi keunggulan yang dimiliki masing-masing sekolah.

Bab II

KAJIAN TEORETIS

A. Pembiayaan

UNESCO dalam berbagai studinya mengungkapkan prinsip-prinsip dasar pembiayaan sekolah yang sesungguhnya sesuai dengan proses pemberdayaan sekolah. Prinsip-prinsip dasar tersebut, antara lain:

1. Dalam pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan keuangan sekolah (SMU Plus), otoritas pembiayaan perlu dibatasi yang memungkinkan adanya kontrol sesuai dengan hasil yang diharapkan. Pembatasan kemenangan ini memungkinkan pula dilakukan perkiraan anggaran yang lebih akurat.
2. Dalam pengelolaan keuangan sekolah, semua mata anggaran perlu dicantumkan tujuannya, dan jenisnya.
3. Pengelolaan keuangan perlu dilakukan secara transparan. Semua dana pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

B. Bentuk-Bentuk Pembiayaan

Di berbagai negara, pengembangan sekolah unggul dilakukan melalui empat bentuk pembiayaan. Bentuk pertama ialah dengan mengalokasikan sejumlah dana untuk didepositokan di Bank (endowment). Bunga yang diperoleh (interest fee) dari deposito itu digunakan untuk membiayai operasionalisasi kegiatan sekolah. Untuk memperoleh "interest fee" yang tinggi dari Bank, jumlah dana yang didepositokan juga harus tinggi. Dana ini sering disebut sebagai "dana abadi" karena tidak boleh diganggu pemakaiannya untuk kepentingan lain. Apabila keseluruhan biaya

operasioanal seperti penggajian guru dan pegawai diperoleh dari dana ini maka dana abadi yang diperlukan tentulah amat besar.

Bentuk kedua, ialah dengan memobilisasi sumber-sumber dana yang ada di masyarakat. Sumber-sumber ini dapat diperoleh apabila tingkat status sosial ekonomi masyarakat setempat relatif tinggi. Keadaan ini belum dapat menjamin apabila kesadaran masyarakat setempat tentang arti pentingnya keberadaan sebuah sekolah berkualitas belum terbentuk. Dalam kehidupan mayoritas masyarakat Indonesia, terdapat sejumlah sumber-sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan SMU Plus. Sumber-sumber tersebut antara lain berbentuk wakaf dan hibah. Wakaf sesungguhnya adalah bentuk pemberian dari seseorang kepada lembaga pendidikan yang umumnya berbentuk tanah, emas, atau bangunan. Demikian juga hibah, umumnya disampaikan dalam bentuk barang (bukan uang).

Selanjutnya, selain sumber-sumber dana masyarakat tersebut, pembiayaan sekolaaah yang bersumber dari pemerintah dideskripsikan dalam berbagai bentuk berikut ini:

1. Anggaran Rutin (DIK Setjen II)

Anggaran rutin untuk sekolah-sekolah di lingkungan pembinaan Ditjen Dikdasmen pada setiap tahun anggaran dialokasikan melalui DIK Setjen II meliputi:

- a. Belanja Pegawai untuk gaji dan tunjangan istri/suami/anak (MAK 5110), tunjangan beras, (MAK 5120), honorarium, vakasi, lembur, dan lain-lain (MAK 5150)
- b. Belanja Barang meliputi keperluan sehari-hari perkantoran (MAK 5210), inventaris kantor (MAK 5220), langganan daya dan jasa (MAK 5230), dan lain-lain (MAK 5250)
- c. Belanja Pemeliharaan meliputi pemeliharaan gedung kantor (MAK 5310), pemeliharaan kendaraan (MAK 5330), dan pemeliharaan lain-lain (MAK 5350).

- d. Belanja Perjalanan meliputi perjalanan dinas biasa (MAK 5410), khusus unit kerja bukan untuk sekolah.

2. Anggaran Pembangunan (DIP/PO)

Untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah melalui program operasi dan penawaran fasilitas Depdikbud untuk sekolah-sekolah di lingkungan pembinaan Ditjen Dikdasmen memperoleh biaya operasi dan penawaran yang penggunaannya untuk masing-masing jenis sekolah ada petunjuk teknis penggunaannya. Dana operasi dan perawatan hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat teknis edukatif dan kegiatan penunjang PBM.³

Dana yang bersumber dari pemerintah hanya dapat dimanfaatkan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah digariskan. Meskipun, pada dasarnya penggunaan dana operasi dan perawatan dilaksanakan secara swakelola dimana dana tersebut diberikan kepada sekolah dan sekolah yang bersangkutan mempertanggungjawabkan secara tertib, terarah dan tepat waktu kepada proyek/bagian proyek OPF Dikdasmen di kabupaten/kotamadya setempat.

3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Dana Penunjang Pendidikan (DPP)

SPP/DPP merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan. Besarnya biaya SPP/DPP ditetapkan berdasarkan ketetapan SKB tersebut. Sumbangan pendidikan yang dibayarkan oleh siswa untuk menunjang biaya pendidikan di sekolah dikembalikan berupa Dana

³ Yang dimaksud kegiatan teknis edukatif adalah kegiatan-kegiatan sekolah yang langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar, sedangkan kegiatan yang bersifat penunjang adalah kegiatan yang tidak langsung berkaitan dengan PBM tetapi fungsinya menunjang PBM.

Penunjang Pendidikan (DPP) yang besarnya ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴

Dengan memperhatikan anggaran yang diperoleh sekolah berdasar kategori tersebut, jelas bahwa sumber dana amat sulit untuk membiayai penyelenggaraan SMU Plus. Apalagi, SPP ini telah diatur penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam SK bersama tersebut.⁵

- a. Pelaksanaan pelajaran
- b. Pengadaan sarana dan prasarana termasuk pengadaan buku perpustakaan
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana
- d. Kesejahteraan pegawai sekolah termasuk kepala sekolah/wakil kepala sekolah, wakil filial kelas jauh, guru tetap/tidak tetap dan tata usaha
- e. Kegiatan pelajar di sekolah, Kandep, dan Kantor Wilayah,
- f. Pengadaan buku laporan pendidikan
- g. Penyelenggaraan EBTA/EBTANAS, pengiriman dan penulisan STTB/NEM
- h. Perjalanan dinas supervisi
- i. Pengelolaan di sekolah, Kandep dan Kantor Wilayah, dan
- j. Pendataan di Kandep termasuk di Kecamatan dan Kantor Wilayah.

4. Badan Pembinaan Pengelolaan Pendidikan (BP-3)

BP-3 merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pendidikan di sekolah dalam rangka menunjang kegiatan PBM. Besarnya dana BP-3 setiap sekolah, daerah

4

Misalnya kategori sumbangan SPP (SMU) dalam satu bulan: (1) Kategori I Rp. 3.000,-, (2) Kategori II Rp. 2.000,-, (3) Kategori III Rp. 1.400,-, (4) Kategori IV Rp. 900,-.

5 Dana penunjang pendidikan berdasarkan SKB tersebut digunakan untuk: (a) pelaksanaan pelajaran, (b) pengadaan sarana dan prasarana termasuk pengadaan buku perpustakaan, (c) pemeliharaan sarana dan prasarana, (d) kesejahteraan pegawai sekolah termasuk kepala sekolah/wakil kepala sekolah, wakil filial kelas jauh, guru tetap/tidak tetap dan tata usaha, (e) kegiatan pelajar di sekolah, Kandep, dan Kantor Wilayah, (f) pengadaan buku laporan pendidikan, (g) penyelenggaraan EBTA/EBTANAS, pengiriman dan penulisan STTB/NEM, (h) perjalanan dinas supervisi, (i) pengelolaan di sekolah, Kandep dan Kantor Wilayah, dan (j) pendataan di Kandep termasuk di Kecamatan dan Kantor Wilayah.

tidak sama bergantung pada situasi dan kondisi lingkungan serta kemampuan ekonomi masyarakat. Misalnya untuk daerah perkotaan, dana BP-3 umumnya lebih besar dari daerah pedesaan. Pengurus BP-3 dibentuk berdasarkan musyawarah dan mufakat dari anggota BP-3 agar mampu bekerjasama dengan Kepala Sekolah.

5. Sponsor

Sponsor merupakan sumber biaya pendidikan yang berasal dari anggota masyarakat atau badan usaha/perusahaan. Bantuan itu diberikan secara sukarela tanpa ikatan apapun untuk membantu biaya proses belajar mengajar di sekolah.

C. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)

RAPBS merupakan rencana program dan kegiatan yang sangat terkait dengan waktu serta sumber-sumber pembiayaan untuk masing-masing kegiatan dalam satu tahun anggaran guna menunjang kelancaran PBM. Dengan RAPBS akan mencerminkan sumber pembiayaan yang diperoleh dari masing-masing kegiatan serta dimungkinkan dibiayai dari beberapa sumber pembiayaan dan sekaligus sebagai alat monitor dan pengawasan kelancaran PBM.

Dilihat dari segi statusnya, terdapat perbedaan sumber pembiayaan antara sekolah negeri dengan swasta sebagai berikut:

a. Sekolah negeri

Sumber dana sekolah negeri terutama adalah berasal dari pemerintah, berupa dana rutin yang digunakan sebagai gaji guru dan pegawai, OPF (Operasi dan Perawatan Fasilitas) dan DPP (Dana Penyelenggaraan Pendidikan). Sumber DPP, berasal dari iuran SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) dari siswa yang oleh sekolah disetor ke rekening kas negara, kemudian didistribusikan kembali ke sekolah. Besarnya iuran SPP ini ditetapkan oleh pemerintah dengan ketentuan sama besar untuk setiap siswa. Kecuali itu, sumber dana sekolah negeri juga bersumber dari orangtua, melalui BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan

Pendidikan). Meskipun pemerintah memberikan sumbangan yang besar terhadap biaya pendidikan di sekolah negeri, namun kontribusi BP3 dalam pembiayaan pendidikan terutama cukup bermakna.

b. Sekolah Swasta

Sumber dana untuk sekolah-sekolah swasta umumnya berasal dari dana pengelolaan yang dibentuk oleh suatu perkumpulan atau Yayasan dalam bentuk kelembagaan. Lembaga inilah yang memberikan bantuan dalam pengelolaan program-program yang ditetapkan oleh sekolah-sekolah.

D. Strategi Pemberdayaan SMU Plus

Pada hakekatnya tujuan pemberdayaan SMU Plus adalah untuk melepaskan ketergantungan sekolah dari dukungan pembiayaan pemerintah. Apabila SMU Plus sepenuhnya bergantung dari anggaran pemerintah, suatu saat apabila dukungan itu berkurang maka kelangsungan pengembangannya dapat mengalami stagnasi. Hal ini dapat berakibat rendahnya mutu output sekolah. Oleh sebab itu, usaha-usaha pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui:

1. Pengembangan sejumlah kebijaksanaan pemberdayaan dan peningkatan otonomi sekolah perlu dilakukan di tingkat pusat dengan memperhatikan kebijakan desentralisasi.
2. Sebuah yayasan dapat dibentuk di setiap SMU Plus yang berperan untuk memobilisasi dana dan sumber-sumber daya lainnya dari masyarakat, dan dukungan dari perorangan yang mempunyai kepedulian terhadap peningkatan mutu pendidikan.
3. Suatu badan akreditasi profesional yang diakui integritasnya perlu dibentuk di setiap propinsi untuk tetap mempertahankan peran SMU Plus sebagai "growth

center” dalam hal pengembangan mutu di setiap propinsi yang telah mengembangkan SMU Plus.

4. Status akreditasi SMU Plus perlu dikaitkan dengan indikator-indikator mutu yang dicapai dengan memperhitungkan unit cost per siswa, dan kemampuan orang tua untuk mendukung upaya peningkatan mutu tersebut
5. Setiap SMU Plus dapat mengembangkan “unit cost” minimal menurut ukuran setempat untuk mencapai tingkat kualitas pendidikan tertentu yang diharapkan. dan “Unit cost” ini dapat bervariasi antar suatu daerah dengan daerah lainnya.
6. Di setiap propinsi perlu dibentuk suatu badan penyanggah dana baik berupa yayasan maupun sebagai bagian integratif struktur organisasi sekolah yang ada yang dapat memobilisasi dana dari berbagai sumber termasuk BP3, dan menentukan distribusi pemerataannya ke berbagai SMU Plus, sekiranya terdapat lebih dari satu SMU Plus yang dikembangkan.
7. Setiap bantuan yang disalurkan dialamatkan langsung ke sekolah (melalui Bank), sehingga SMU Plus tersebut di Bank, sehingga pihak sekolah dapat memanfaatkan dana tersebut secara lebih mudah tanpa melalui proses birokrasi yang panjang.
8. Bantuan yang diterima oleh setiap SMU Plus akan diaudit/dipertanggungjawabkan setiap tahun dengan memperhatikan keberhasilan sekolah tersebut dalam hal pencapaian mutu, peningkatan jumlah siswa, dan berbagai prestasi keunggulan lainnya dalam bidang akademik, seni, dan olah raga.
9. Bantuan yang berasal dari masyarakat dalam bentuk wakaf, gedung, bangunan, ruang kelas, dan sebagainya perlu disesuaikan dengan perencanaan SMU Plus yang bersangkutan agar tidak terjadi inefisiensi pemanfaatan sumber dana.

Bab III

Metodologi Penelitian

A. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada 12 provinsi yang telah mengembangkan secara khusus SMU Plus, baik pengelolaannya dilakukan secara murni oleh pemerintah (Depdikbud), maupun yang dibangun dan dikelola oleh swasta/yayasan penyelenggara pendidikan, serta yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah (Pemda, Kanwil Depdikbud) bekerjasama dengan pihak swasta/yayasan penyelenggara pendidikan.

Berdasarkan acuan tersebut, maka pada setiap provinsi dipilih 1 (satu) SMU Plus sebagai sampel penelitian. Tempat penelitian dalam hal ini adalah:

1. SMUN 17 Ujung Pandang (Propinsi Sulawesi Selatan)
2. SMUN I Padang (Propinsi Sumatera Barat)
3. SMUN 2 Sopo Surung Balige (Propinsi Sumatera Utara)
4. SMU Titian Teras (Propinsi Jambi)
5. SMU Al-Kautsar (Propinsi Lampung)
6. SMUN 3 Bandung (Propinsi Jawa Barat)
7. SMUN I Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta)
8. SMU Taruna Nusantara Magelang (Propinsi Jawa Tengah)
9. SMUN II Surabaya (Propinsi Jawa Timur)
10. SMU Bumi Katulistiwa (Propinsi Kalimantan Barat)
11. SMUN I Riau (Propinsi Riau)
12. SMUN 8 Jakarta (DKI Jakarta)

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi teoretis penelitian ini adalah semua SMU Plus di seluruh tanah air yang telah dikembangkan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun kerjasama antara pemerintah dan swasta, dan pihak swasta murni.

Dengan berbagai keterbatasan, penelitian ini hanya mengambil dua belas provinsi sebagai sampel. Pada setiap provinsi diambil satu SMU yang mempunyai predikat SMU Plus.

C. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan teknik analisis secara kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data secara kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel penelitian. Sedangkan analisis data secara kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran lebih jauh tentang permasalahan penelitian.

Bab IV

TEMUAN PENELITIAN

1. SMUN 3 Bandung

Sebagai sekolah negeri yang telah diakui oleh masyarakat luas sebagai sekolah unggul tampak biaya operasional keseluruhan penyelenggaraan sekolah jauh lebih rendah dibanding sekolah swasta yang dikembangkan menjadi sekolah unggul.

Tabel 4.1: Program dan Alokasi Anggaran Penyelenggaraan Sekolah Tahun Pelajaran 1997/1998

No.	Sumber dana Program	Keperluan (%)	Dana yang Tersedia (%)			Sumbangan (%)	
			Rutin	DPP	OPF	Murid Baru	Bulanan
1	Pengadaan dan Pemeliharaan	14	3	1		8,00	2,00
	Sarana/prasarana pendidikan		4			10,00	
2	Peningkatan KBM	36	20	1	2	11,00	3,00
			23			13,00	
3	Peningkatan Kegiatan	8				6,00	1,00
	Pembinaan Kesiswaan					8,00	
4	Dukungan biaya Kegiatan	32		3		22,00	7,00
	Personil dan Peningkatan Keterampilan		3			29,00	
5	Kegiatan Rumah	10	3			6,00	1,00
	Tangga Sekolah Dan BP3		3			8,00	
		100	25	5	3	53,00	15,00
			32			68,00	

Sumber : SMUN 3 Bandung

2. SMUN 2 Surabaya

Tabel 4.2 : Program dan Alokasi Anggaran Penyelenggaraan Sekolah SMUN 2 Surabaya Tahun 1998/1999

No	Sumber Dana	Jumlah	Rutin (DIK)	DIP/OPF	DPP	BP-3
	Kegiatan	%	%	%	%	%
1	Kesejahteraan Peg. Sekolah	81.43	55.30	0.00	3.87	22.26
			59.18			
2	Pelaksanaan Pelajaran	7.79	4.48	0.01	0.98	2.31
			5.47			
3	Pem.haraan Sarana & Prasarana	4.23	0.70	0.19	0.65	2.69
			1.54			
4	Langganan daya dan jasa	3.34	1.13	0.00	0.00	2.21
			1.13			
5	Penyelenggaraan EBTA/EBTANAS	0.64	0.00	0.00	0.16	0.48
			0.16			
6	Kegiatan OSIS	0.60	0.00	0.00	0.29	0.30
			0.29			
7	Kegiatan BP-3	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48
			0.00			
8	Kegiatan Tim Koordinasi	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
			0.00			
9	Perjalanan Dinas dan Supervisi	1.13	0.00	0.00	0.00	1.13
			0.00			
10	Lain-lain (KKKS)	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21
			0.00			
			67.76			
		1	61.61	0.21	5.95	32.24

Sumber: SMUN 2 Surabaya

3. SMUN 8 Jakarta

a. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

Biaya penyelenggaraan merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan mutu hasil belajar. Dalam tiga tahun terakhir ini dana pembiayaan pendidikan di SMUN 8 Jakarta cenderung terus meningkat. Sumber dana di peroleh dari: (a) dana rutin, (b) dana OPF (Operasional Perawatan Fasilitas), (c) DPP (Dana Penyelenggaraan Pendidikan), dan (d) Dana BP3 (termasuk uang siswa baru/uang sumbangan awal tahun).

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa besarnya dana yang bersumber dari BP3 dalam tahun ajaran 1998/1999 relatif cukup besar. Hal ini menunjukkan besarnya tanggung jawab dan partisipasi dari orang tua siswa dalam membantu menanggung biaya pengelolaan sekolah. Besarnya sumbangan dari orang tua/wali siswa diberlakukan secara merata, dan berlaku bagi semua orang tua/wali siswa. Di samping pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sekolah diperoleh dari sumber dana yang telah disebutkan, maka dana pembiayaan penyelenggaraan sekolah juga diperoleh dari sumbangan siswa baru pada setiap awal tahun ajaran.

Tabel 4.3: Jenis dan Sumber Dana SMUN 8 Jakarta

No.	Jenis Sumber/Jumlah	T a h u n Ajaran 1998/1999
1.	Dana Rutin	541.267.000.-
2.	Dana OPF	1.780.000.-
3.	Dana DPP	29.724.000.-
4.	Dana BP3/POMG (termasuk uang siswa baru/sumbangan awal tahun)	1.441.907.957,-
T o t a l		2.014.678.957.-

Sumber: SMUN 8 Jakarta

Selanjutnya data tentang rasio jenis dan jumlah sumber dana per siswa dapat dilihat pada Tabel 4.4, di halaman berikut.

Tabel 4.4: Unit Cost Rasio Jenis dan Besarnya Sumber Dana Per Siswa SMUN 8 Jakarta

No.	Jenis Sumber	Rasio/siswa
1	Dana Rutin	462.622,-
2	Dana OPF	1.521,-
3	Dana DPP	25.405,-
4	Dana BP3/POMG	1.232.400,-
T o t a l		1.721.948,-

Sumber: SMUN 8 Jakarta

Pada tahun 1998/1999, unit cost per siswa atau dana penyelenggaraan pendidikan per siswa di SMUN 8 Jakarta adalah Rp. 1.721.948,-. Berdasarkan data yang ada terlihat jumlah unit cost per siswa cukup besar untuk rata-rata masyarakat Indonesia, tapi dari pihak sekolah diambil kebijakan untuk membebaskan dana BP3 untuk siswa tertentu.

**Penggunaan Dana Pendidikan SMUN 8 Jakarta
Tahun Ajaran 1997/1998**

1. Anggaran rutin 1998/1999	
a. Jumlah DIK	= Rp. 541.267.000,-
b. Realisasi penggunaan	= Rp. 641.435.497,-
c. Jumlah MAK	= Rp. 81.606.000,-
c. Realisasi penggunaan	= Rp. <u>81.605.045,-</u>
	955,-
2. Dana OPF	
a. Rehabilitasi bangunan	= Rp. 840.000,-
b. Perawatan Fasilitas	= Rp. 840.000,-
c. Pembinaan	= Rp. <u>100.000,-</u>
	1.780.000,-
Realisasi:	
a. Perawatan Fasilitas	= Rp. 840.000,-
b. Rehabilitasi bangunan	= Rp. 840.000,-
c. Pembinaan	= Rp. <u>100.000,-</u>
	1.780.000,-
3. Dana DPP	
a. Penerimaan	= Rp. 29.724.000,-
b. Realisasi pengeluaran	= Rp. <u>24.551.200,-</u>
	5.172.800,-

Tabel 4.5: Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana BP3
SMUN 8 Jakarta

No	Program	Pengeluaran	Penerimaan
A.	Sumbangan Awal Tahun 1998/1999		12.204.500,00
1	Kesejahteraan Guru dan Karyawan	7.132.500,00	
2	Kegiatan OSIS	1.109.500,00	
3	Evaluasi KBM	987.500,00	
4.	Pemeliharaan Taman dan Penghijauan	363.000,00	
5.	Pengelolaan Perpustakaan	634.000,00	
	Jumlah Penggunaan		10.226.500,00
	Saldo		1.978.000,00
B.	Penerimaan Bulanan Saldo Per 30 Juni 1998		289.157.952,00
	Penerimaan		837.221.000,00
			1.126.378.952,00
	Pengeluaran		950.328.250,00
			176.050.702,00
C.	Program Pengembangan Sekolah Plus (Sumbangan Sukarela BP3)		
	Saldo Per 30 Juni 1998		10.054.505,00
	Penerimaan		293.270.000,00
		Jumlah	303.324.505,00
1.	Bahan Praktek IPA	Buku	8.552.290,00
2.	Perpustakaan		11.183.350,00
3.	Studi Banding		29.480.000,00
4.	Biaya Internet		11.669.250,00
5.	Pelatihan Guru IPA		3.230.500,00
6.	Pengadaan OHP		19.250.000,00
7.	Pengadaan AC		5.250.000,00
8.	Kesra Akhir Tahun		24.160.000,00
9.	Seragam Guru		25.531.000,00
10.	Dana Sosial		9.646.000,00
11.	Penghijauan		739.500,00
12.	Dana Tamu		3.828.000,00
13.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana		10.911.800,00
14.	Evaluasi Cawu		16.105.500,00
15.	Kegiatan Penelitian		2.250.000,00
16.	Kegiatan Perlombaan		1.470.000,00
17.	Renovasi Gedung		6.725.950,00
18.	Biaya Tak Terduga		21.601.650,00
			211.585.540,00
	Saldo Per 27 Februari 1999		91.738.965,00
	TOTAL SALDO A+B+C		269.767.667,00

Sumber: SMUN 8 Jakarta

Dalam hal Pendanaan Pendidikan peranan masyarakat dalam hal ini BP3 sangat besar sekali, secara khusus BP 3 memberikan saran-saran terhadap sekolah untuk meningkatkan proses belajar mengajar, kualitas lulusan, dan saran-saran lainnya berkenaan dengan peningkatan mutu sekolah.

BP3 memperoleh dana dari orang tua murid, berupa sumbangan awal tahun, iuran siswa setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan kemampuan dan kerelaan orang tua siswa, sumbangan sukarela, dan sumbangan lain dari berbagai pihak yang sifatnya tidak terikat. Kegiatan tersebut dilaksanakan langsung oleh pengurus BP3 berdasarkan hasil musyawarah BP3 dan anggotanya.

4. SMUN 17 Ujung Pandang

a. Biaya Penyelenggaraan

Biaya penyelenggaraan merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan mutu hasil belajar. Dalam tiga tahun terakhir ini dana pembiayaan pendidikan di SMUN 17 Ujung Pandang cenderung terus meningkat. Sumber dana di peroleh dari: (a) dana rutin, (b) dana OPF (Operasional Perawatan Fasilitas), (c) DPP (Dana Penyelenggaraan Pendidikan), dan (d) Dana BP3 (termasuk uang siswa baru/uang sumbangan awal tahun).

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa besarnya dana yang bersumber dari BP3 dalam tahun ajaran 1997/1998 relatif cukup besar. Hal ini menunjukkan besarnya tanggung jawab dan partisipasi dari orang tua siswa dalam membantu menanggung biaya pengelolaan sekolah. Besarnya sumbangan dari orang tua/wali siswa diberlakukan secara merata, dan berlaku bagi semua orang tua/wali siswa. Di samping pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sekolah diperoleh dari sumber dana yang telah disebutkan, maka dana pembiayaan penyelenggaraan sekolah juga diperoleh dari sumbangan siswa baru pada setiap awal tahun ajaran.

Tabel 4.6: Jenis dan Sumber Dana SMUN 17 Ujung Pandang

No.	Jenis Sumber/Jumlah	Tahun Ajaran 1998/1999
1.	Dana Rutin	27.570.000,-
2.	Dana OPF	1.500.000,-
3.	Dana DPP	6.840.000,-
4.	Dana BP3/POMG (termasuk uang siswa baru/sumbangan awal tahun)	59.850.000,-
T o t a l		95.760.000,-

Sumber: SMUN 17 Ujung Pandang

Selanjutnya data tentang rasio jenis dan jumlah sumber dana per siswa dapat dilihat pada Tabel 4.7, di bawah ini.

Tabel 4.7: Unit Cost Rasio Jenis dan Besarnya Sumber Dana Per Siswa SMUN 17 Ujung Pandang

No.	Jenis Sumber	Rasio/siswa 1998/1999
1	Dana Rutin	Rp. 78.771,-
2	Dana OPF	Rp. 4.286,-
3	Dana DPP	Rp. 19.543,-
4	Dana BP3/POMG	Rp. 171.000,-
T o t a l		Rp. 273.600,-

Sumber: SMUN 17 Ujung Pandang

Pada tahun 1998/1999, unit cost per siswa atau dana penyelenggaraan pendidikan per siswa di SMUN 17 Ujung Pandang adalah Rp. 273.600,-.

Tabel 4.8: Penggunaan Dana Pendidikan SMUN 17 Ujung Pandang

No. Urut	ANGGARAN BELANJA SEKOLAH	
	URAIAN	JUMLAH
1	Barang Keperluan Kantor	Rp. 946.000,-
2	Inventaris Kantor	Rp. 855.000,-
3	Daya dan Jasa	Rp. 5.400.000,-
4	Bahan dan Peralatan Pelaksana Pelajaran (gedung, peralatan, dll)	Rp. 19.708.000,-
5	Pelaksanaan Pelajaran	Rp. 10.837.000,-
6	Kesejahteraan Guru dan Pegawai	Rp. 39.375.000,-
7	Kegiatan Pelajar	Rp. 87.000,-
8	Pengelolaan Pelaksanaan Pelajaran	Rp. 123.000,-
9	Pembuatan RAPBS	Rp. 100.000,-
10	Honorarium Penjaga/Satpam dan Bujang Sekolah	Rp. 7.200.000,-
1	Honorarium Instruktur (Pelatih Drum Band)	Rp. 3.600.000,-
12	Insentif Guru Honor	Rp. 6.408.000,-
13	Biaya Penerimaan Tamu	Rp. 1.500.000,-
14	Biaya Rapat	Rp. 1.500.000,-
15	Biaya Pelaksanaan Cawu	Rp. 6.000.000,-
16	Biaya Pelaksanaan EBTA/EBTANAS	Rp. 4.000.000,-
17	Pelajaran Tambahan	Rp. 5.000.000,-
18	Kegiatan Ekstra Kurikuler	Rp. 2.625.000,-
19	Pembinaan	Rp. 1.500.000,-
20	Biaya Administrasi Tim Koordinasi BP3.	Rp. 1.312.500,-
21	Biaya Perbaikan Sarana dan Prasarana	Rp. 5.950.000,-
22	Kegiatan OSIS	Rp. 4.200.000,-
23	Kegiatan Pramuka	Rp. 3.150.000,-
24	Kegiatan Masa Orientasi Siswa Baru	Rp. 1.500.000,-
25	Dan Lain-lain	Rp. 2.487.500,-
T o t a l		Rp. 135.916.000,-

Sumber: SMUN 17 Ujung Pandang

5. SMUN 1 Yogyakarta

a. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

Biaya penyelenggaraan merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan mutu hasil belajar. Dalam tiga tahun terakhir ini dana pembiayaan pendidikan di SMUN I Yogyakarta cenderung terus meningkat. Sumber dana di

peroleh dari: (a) dana rutin, (b) dana OPF (Operasional Perawatan Fasilitas), (c) DPP (Dana Penyelenggaraan Pendidikan), dan (d) Dana BP3 (termasuk uang siswa baru/uang sumbangan awal tahun).

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa besarnya dana yang bersumber dari BP3 dalam tiga tahun terakhir ini (1994/1995 - 1996/1997) relatif cukup besar. Hal ini menunjukkan besarnya tanggung jawab dan partisipasi dari orang tua siswa dalam membantu menanggung biaya pengelolaan sekolah. Besarnya sumbangan dari orang tua/wali siswa diberlakukan secara merata, dan berlaku bagi semua orang tua/wali siswa. Di samping pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sekolah diperoleh dari sumber dana yang telah disebutkan, maka dana pembiayaan penyelenggaraan sekolah juga diperoleh dari sumbangan siswa baru pada setiap awal tahun ajaran.

Tabel 4.9: Jenis dan Sumber Dana SMUN I Yogyakarta

No.	Komponen	T a h u n		
		1994/1995	1995/1996	1996/1997
1.	Dana Rutin	302.890.000,-	368.940.000,-	403.267.000,-
2.	Dana OPF	5.457.600,-	5.081.600,-	4.996.000,-
3.	Dana DPP	7.640.000,-	8.480.000,-	9.442.000,-
4.	Dana BP3/POMG (termasuk uang siswa baru/sumbangan awal tahun)	66.060.000,-	76.630.000,-	77.513.000,-
T o t a l		382.047.600,-	459.131.000,-	495.218.000,-

Sumber: SMUN 1 Yogyakarta

Selanjutnya data tentang rasio jenis dan jumlah sumber dana per siswa dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10: Unit Cost Rasio Jenis dan Besarnya Sumber Dana Per Siswa SMUN I Yogyakarta

No.	Jenis Sumber	Rasio/siswa	
		1996/1997	1997/1998
1	Dana Rutin	Rp. 567. 482,-	Rp. 575. 274,-
2	Dana OPF	Rp. 7. 229,-	Rp. 7. 127,-
3	Dana DPP	Rp. 12. 063,-	Rp. 13. 469,-
4	Dana BP3/POMG	Rp. 109. 004,-	Rp. 110. 575,-
T o t a l		Rp. 695. 778,-	Rp. 706. 445,-

Pada tahun 1996/1997, unit cost per siswa atau dana penyelenggaraan pendidikan per siswa di SMUN I Yogyakarta adalah Rp. 695.778,-. Sedangkan pada tahun berikutnya (1997/1998), mengalami kenaikan menjadi Rp. 706.445,-

Tabel 4.11: Penggunaan Dana Pendidikan SMUN I Yogyakarta Tahun Ajaran 1997/1998

Jenis Pengeluaran	Rutin	OPF	DPP	BP3	Total
1. Kesejahteraan	290. 000. 000.				
1.1. Gaji Guru	71. 000. 000.		6. 100. 000		
1.2. Gaji Pegawai			1. 250. 000		
1.3. Honor guru tidak tetap (termasuk honor kelebihan mengajar)				17. 500. 000.	
1.4. Tunjangan gurudan Kepala Sekolah.	15. 000. 000			6. 500. 000.	
1.5. Lembur					
Jumlah	376. 128. 000.		7. 350. 000.	24. 000. 000.	413. 478. 000.
2. Proses Belajar Mengajar.					
2.1 Kegiatan inti				5. 250. 000	
2.2 Kegiatan Penunjang	2. 100. 000	1. 550. 000.		6. 700. 000	
2.3 Kegiatan Siswa			200. 000.	9. 500. 000.	
Jumlah	2. 100. 000	1. 550. 000.	200. 000.	21. 450. 000.	23. 300. 000.
3. Pengadaan Alat, media dan bahan pelajaran	12. 500. 000.	2. 200. 000.	9. 500. 000.	7. 750. 000.	
4. Sarana-Prasarana Pengadaan sarana dan perawatan sarana sekolah.	3. 435. 000.			8. 500. 000.	

5. Biaya Operasional lainnya, perluasan (gedung/ruang belajar, laboratorium, perpustakaan dan sarana lainnya.				9.250.000.	
5.1 Lainnya	2.000.000.	1.246.000.	942.000	6.563.000.	
Total	396.163.000	4.996.000.	9.442.000.	77.513.000.	432.778.000.

Sumber: SMUN 1 Yogyakarta

6. SMU Taruna Nusantara Magelang

Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

Masalah pendanaan SMU Taruna Nusantara sepenuhnya berada dalam pengelolaan LPTTN. Unit cost/siswa di SMU Taruna Nusantara dalam setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 5.000.000,-

7. SMUN 2 Balige (Yayasan Soposurung)

Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

Seperti halnya Sekolah negeri lainnya sumber pendanaan berasal dari Pemerintah pusat dan Orang Tua Siswa. Jumlah dana yang diterima SMU dalam setiap tahun sebesar Rp 221.905.000,- Dengan rincian ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.12: Daftar Sumber Dana Operasional SMU 2 Balige

No	Sumber Dana	Jumlah
1	Pemerintah Pusat	199.123.300
	a. DIK	
	- Belanja Pegawai	146.623.800
	- Belanja Barang	32.340.000
	-Pemeliharaan	5.130.000
	b. DPP	6,992.000
	c. Subsidi Swasta	
	d. Guru DPK	
	e. OPF Dikdasmen	1.670.000
2	Orang Tua siswa	
	a. Uang Sekolah	7.167.600
	b. BP3/POMG	21.905.900
	J u m l a h	221.905.900

Sumber: SMUN 2 Balige

Sebagai besar dana digunakan untuk honor Guru, yaitu sebesar Rp. 146.623.800,- Kemudian biaya PBM dan honor pegawai administrasi. Sumber dana yang digunakan sebagai biaya Operasional Asrama Soposurung berasal dari Bunga dana Abadi Yayasan Soposurung. Berdasarkan hasil wawancara besarnya dana yang digunakan sebagai biaya operasional Asrama sebesar kurang lebih Rp 30.000.000,- per bulan. Dana tersebut digunakan untuk biaya konsumsi siswa, perawatan fasilitas dan Honor Pegawai Dana tersebut digunakan untuk biaya operasional dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.13: Rincian Penggunaan Dana SMUN 2 balige

No	Jenis Kegiatan	Jumlah	
1	Gaji Guru + Kesra		146. 623.800,-
	a. Gaji guru	140. 023.800	
	b. Gaji guru Honoren	1.080.000	
	c. Kesra Guru	4.980.000	
2	Gaji + Kesra Pegawai		7.920.000,-
	a. Gaji Pegawai	6.600.000	
	b. Gaji Pegawai Honorer	7.200.000	
	c. Kesra Pegawai	720.000	
3	Proses Belajar mengajar		32.019.500,-
4	Pemeliharaan Sarana Prasarana		7 700.000,-
	a. Gedung	2.700.000,-	
	b. Alat-alat	2.500.000,-	
	c. Perabot	2.500.000,-	
5	Rehabilitasi		3.000.000
6	Pengadaan sarana Prasarana		5.000.000
	a. Pengadaan Buku		
	b. Pengadaan lainnya	5.000.000,-	
7	Kegiatan Ekstrakurikuler		4.400.000,-
8	Daya dan Jasa		1.815.665,-
9	Tata Usaha/Adm.		
10	Lainnya/Setoran SPP		7.966.935
J u m l a h			221.905.900,-

Sumber: SMUN 2 Balige

8. SMU Titian Teras Jambi

Pembiayaan Pendidikan

Biaya penyelenggaraan merupakan salah satu komponen yang penting dalam menentukan mutu hasil belajar. SMU Titian Teras adalah salah satu SMU swasta yang semua pendanaan diwadahi oleh Yayasan Pendidikan Jambi. Menurut Informasi yang diperoleh dari Kepala Tata Usaha SMU Titian Teras adalah besarnya anggaran operasional yang dipergunakan dalam satu bulan kurang lebih Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), belum termasuk gaji guru sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah tiap bulan untuk gaji guru SMU Titian Teras sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Jadi berdasarkan data tersebut maka dapatlah diambil kesimpulan besarnya Unit cost persiswa SMU Titian Teras adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (6 juta rupiah) per tahun.

Walaupun besarnya unit cost per tahun, siswa SMU Titian Teras Jambi tidak dikenakan biaya, semuanya menjadi tanggung jawab pihak Yayasan.

Bab V

REKOMENDASI

Sistem pembiayaan pendidikan pada SMU PLUS masih mengandalkan sumber pembiayaan dari orang tua murid, dan sumber pembiayaan lain di luar yang bersumber dari pemerintah. Hal ini diperlukan untuk membiaya kegiatan plus (tambahan) dari sekolah yang bersangkutan. Hal-hal yang menyebabkan sekolah itu mendapat predikat plus dikarenakan adanya kegiatan tambahan untuk membekali siswa pada ranah kognitif, afektif dan psikomotor.

Kegiatan tambahan pada untuk mengisi ranah kognitif dalam bentuk pengayaan dan pendalaman mata-mata pelajaran tertentu di luar jadwal pelajaran reguler. Kegiatan lomba karya ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Adapun pelaksanaan pengayaan dan pendalaman ini ada yang dilaksanakan sendiri dan juga ada yang berkerja sama dengan pihak lain. Sedangkan kegiatan untuk mengisi ranah afektif, seperti membentuk sikap kemandirian, tanggung rasa, tanggung jawab umumnya dilaksanakan pada program kesiswaan. Demikian pula halnya dengan kegiatan tambahan untuk membekali pada ranah psikomotor diwadahi dalam program ekstra kurikuler dan kesiswaan.

Dari beberapa sekolah sampel, terlihat bahwa porsi terbesar (hampir 90%) pembiayaan untuk kegiatan tersebut di atas bersumber dari orang tua siswa. Oleh karena itu penelitian sistem pembiayaan pada SMU Plus ini merekomendasikan bahwa :

1. Kegiatan Pembelajaran yang mengarah kepada pembedaan keutuhan siswa tidak terbatas pada kegiatan pembelajaran yang terjadwal secara reguler atau sebatas pada kegiatan intra kurikuler. Melainkan memerlukan suatu kegiatan belajar yang sinergi antara kegiatan intra dan ekstra kurikuler.
2. Meningkatkan peranan dan partisipasi orang tua terutama dalam memberikan biaya pendidikan anak-anaknya, dalam bentuk membantu membiaya kegiatan

ekstra kurikuler di sekolah. Hal ini disebabkan bahwa wajib belajar baru sampai pada jenjang SMTP, konsekwensinya dalam pembiayaan adalah bahwa mulai jenjang SMTA ke atas merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orangtua dan masyarakat.

3. Memperbesar anggaran pendidikan yang bersumber dari pemerintah untuk membiaya kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di luar jadwal pelajaran yang reguler atau ekstra kurikuler.
4. Membentuk suatu forum dialog antara sekolah, orang tua dan masyarakat serta instansi terkait sebagai langkah pertama yang strategis dalam mengelola pembiayaan pendidikan di sekolah.
5. Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada sekolah dalam mengelola pembiayaan sekolah.
6. Menuntut kesiapan yang lebih profesional dari pimpinan sekolah untuk mengelola kerjasama dengan pihak luar sebagai mitra dalam mengelola pembiayaan pendidikan di sekolah.
7. Mengembangkan berbagai sumber pembiayaan pendidikan baik yang berada di lingkungan sekolah maupun yang berada di luar sekolah.

DAFTAR BACAAN

- Jones, Thomas H., (1985), School Finance: Technique and social policy, London Collin MacMillan Publishers.
- Mingat, A. dan Tan JP (1988), Analytical Tools for Sector Work in Education. A World Bank Publication.
- Morphet, Edgar G. (1983), The Economics and Financing of Education (Fourth edition), New Jersey: Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs.
- Ascher, Carol, (1993)., Efficiency, Equity, and Local Control—School Finance in Texas, ED357130 Apr 93, ERIC/CUE Digest, Number 88.
- Carlson, Robert., (1993), Developing Supplemental Funding: Initiatives for Rural and Small Schools., ED357910 93, ERIC Digest.
- Frazier, Linda M., (1993), Deteriorating School Facilities and Student Learning, ED356564 May 93, ERIC Digest, Number 82.
- Oswald, Lori Jo., (1995), Priority on Learning: Efficient Use of Resources, ED384951 Jul 95, ERIC Digest, Number 100.
- Renchler, Ron., (1992)., Financial Equity in Schools, ED350717 Dec 92, ERIC Digest, Number 76.